

Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tungkal Ilir

Nur M. Munzil¹⁾, Dompok Napitupulu²⁾ dan Rosyani²⁾

- 1) Alumni Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi; e-mail : munzil_nur@gmail.com
- 2) Dosen Jurusan Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi

ABSTRAK

Luas kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 225,4 ha. Kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air bersih, sanitasi, persampahan dan proteksi kebakaran, merupakan indikator tingkat kekumuhan. Sesuai indikator-indikator tersebut maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait melaksanakan program-program dalam usaha menangani kekumuhan. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis pengaruh program penanganan pemukiman kawasan kumuh terhadap keberlanjutan program penanganan kawasan permukiman kumuh Metode sampling yang *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan responden 100 masyarakat di lokasi permukiman kumuh dan *Stratified sampling* dengan responden 30 ASN, penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait dalam pengambilan data. Uji Analisis menggunakan metode SEM (*Structural Equation Modelling*) dan pengolahan data dengan menggunakan software SmartPLS (*Partial Least Square*). Hasil penelitian menunjukkan t-statistic untuk variable Integrasi Program terhadap variable Kota Berkelanjutan sebesar $2,185 > t\text{-statistic}$ (1,96). Nilai *Original sample estimate* menunjukkan nilai positif (0,199). yang menunjukkan bahwa pola hubungan integrasi program penanganan kawasan permukiman kumuh dengan keberlanjutan program adalah positif, dengan tingkatan moderat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa integrasi program berpengaruh secara tidak langsung terhadap kota berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dan kawasan kumuh terlaksana masih belum optimal dan cenderung berada ditengah-tengah sehingga masih perlu di laksanakan program dan kegiatan yang terintegrasi dan bersinergi oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kota berkelanjutan.

Kata kunci : Integrasi, Berkelanjutan, Penanganan, Permukiman Kumuh

PENDAHULUAN

Perkembangan wilayah kota Kuala Tungkal telah menjadikan beberapa wilayah permukiman menjadi kumuh. Permukiman kumuh menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Adapun kriteria penilaian permukiman kumuh menjadi 7 (tujuh) indikator yaitu; (1) Keteraturan bangunan; (2) Jalan lingkungan; (3) Drainase lingkungan; (4) Penyediaan Air Bersih/Minum; (5) Pengelolaan Persampahan; (6) Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi; dan (7) Proteksi Kebakaran.

Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurang tanggapnya Pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.

Penanganan wilayah permukiman kumuh tentunya memerlukan penanganan yang serius. Penanganan wilayah permukiman kumuh juga selaras dengan kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan 11, tentang kota dan komunitas serta berkaitan dengan tujuan 6, air bersih dan sanitasi layak.

Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merespon baik amanat UU 1/2011 dengan menerbitkan SK Bupati terkait penetapan lokasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : 438/Kep.Bup/BAPPEMDA/2017, dengan luas kumuh terverifikasi 255.2 hektar. dan Peraturan Bupati nomor : 428 tahun 2017 mencantumkan bahwa luasan kumuh yang ada yakni 225.2 hektar pada 07 April 2017. Luas wilayah tersebut didelineasikan agar dapat diidentifikasi dan divisualisasikan. Lokasi kawasan permukiman kumuh kota Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir tervisualisasikan pada table berikut

Merespon Keputusan Bupati tersebut beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang arahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berkaitan dengan indikator kumuh melaksanakan program yang dapat menuntaskan kawasan permukiman kumuh. OPD tersebut antara lain adalah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai leading sector.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pelaksana teknis program Jalan lingkungan, Drainase, pertamanan dan penerangan jalan umum.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat sebagai pelaksana teknis program penyediaan air minum dan penataan bangunan dan tata kota.
4. Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis program kesehatan dan sanitasi.
5. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis program persampahan dan lingkungan hidup.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksana teknis program proteksi kebakaran.

Program-program yang telah dilaksanakan masing-masing OPD semenjak tahun 2016 hingga saat ini oleh masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel berikut (Bappeda, 2018);

Tabel 1. OPD dan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

No.	OPD	PROGRAM
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan. • Pembangunan drainase lingkungan. • Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah Kumuh Perkotaan (NUSP-2). • Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). • Perawatan drainase kota.
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Bedah Rumah. • Peningkatan akses Air bersih. • Penerbitan dokumen IMB. • Sanitasi Berbasis Masyarakat.
3.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kader Posyandu. • Penyuluhan sanitasi dan hygenitas.
4.	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Pengangkutan sampah • Penambahan sarana persampahan kota
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Pemadam kebakaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan time series dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, pada kelurahan yang terdelineasi kumuh sesuai SK Bupati, dilaksanakan selama 3 (Tiga) Bulan dari Bulan Juli 2019 sampai dengan September 2019. Populasi Penelitian berjumlah 130 orang terdiri dari Seratus Tiga Puluh) responden yang terdiri dari 30 (Tiga Puluh) responden ASN pada OPD terkait dan 100 (Seratus) responden dari masyarakat Responden dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) yang dianggap mewakili, mengetahui dan atau terlibat dalam pelaksanaan program penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir

Sumber data Penelitian adalah data primer yang merupakan hasil kuisioner dilengkapi dengan wawancara dengan responden serta data skunder yang berasal dari laporan-laporan maupun hasil pustaka ilmiah yang mendukung. Penelitian ini akan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis varians atau *Partial Least Square* (PLS) dengan melibatkan beberapa variabel seperti intrasi program penanganan kumuh, partisipasi masyarakat, kawasan kumuh dan kota berkelanjutan. SEM merupakan metode analisis multivariate yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel pengamatan (indikator) dan variabel yang tidak diukur secara langsung (variabel laten) yang terdiri dari endogen dan eksogen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel laten dan variabel laten lainnya. Inner model dikatakan baik apabila nilai Q2 mendekati 1. Semakin tinggi nilai Q2 (mendekati 1) maka akan semakin baik pula kemampuan model dalam memprediksi hubungan antar variabel. Penilaian inner model dengan PLS dilihat dari R2 untuk setiap variabel laten dependen. Hasil estimasi R2 indikator variabel Integrasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Nilai R2 Indikator Variabel Integrasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

	R Square	R Square Adjusted
Kawasan Kumuh (KK)	0.320	0.306
Partisipasi Masyarakat (PM)	0.238	0.230
Kota Berkelanjutan (KB)	0.633	0.621

Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai R2 maupun R2Adjusted yang moderat. Variabel Partisipasi masyarakat memiliki nilai R-Square sebesar 0,238, untuk variabel Kawasan kumuh diperoleh sebesar 0,320, dan nilai R2 Kota Berkelanjutan sebesar 0,633 dan menunjukkan model yang kuat. Menurut Chin (1998), Nilai R2 untuk setiap variable merupakan kekuatan prediksi dari model structural. Nilai R-Squares merupakan hasil uji regresi linear yaitu besarnya variability endogen yang mampu dijelaskan oleh variable eksogen. Nilai R2 = 0,67 menunjukkan kekuatan model kuat; nilai = 0,33 menunjukkan kekuatan model moderat; dan nilai = 0,19 menunjukkan kekuatan model lemah; kurang dari 0,19 dianggap tidak ada kekuatan model Setelah nilai R2 diketahui, uji kecocokan inner model dapat dilanjutkan dengan penilaian goodness of fit (GOF) diketahui melalui nilai predictive relevance atau nilai Q2 yang digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam memprediksi hubungan antar variabel. Nilai Q2 predetive

relevance pada variabel endogen dinyatakan baik (fit model bila nilainya > dari variabel endogen. Nilai Q2 predetive relevance 0,02 berarti validitas relevansi prediktif model lemah; 0.15 validitas relevansi prediktif model moderate; dan 0,35 menunjukkan validitas relevansi prediktif model kuat. Hasil procedure blindfolding pada smart-PLS akan menghasilkan nilai Construct crossvalidated Redundancy seperti pada tabel di bawah ini, dimana validasi relevance predictive model konstruk kawasan kumuh dan partisipasi masyarakat menunjukkan model relevance prediktif moderat.

Tabel 4. Hasil Construct Crossvalidated Redundancy Integrasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

	SSO	SSE	Q2 (1-SSE/SSO)	Ket.
Kawasan Kumuh (KK)	700.000	621.141	0.113	Moderat
Partisipasi Masyarakat (PM)	300.000	265.354	0.115	Moderat
Kota Berkelanjutan (KB)	300.000	193.961	0.353	Kuat

Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019

Discriminant Validity

Menilai discriminant validity dilakukan dengan cara membandingkan square root of average variance extracted (AVE) untuk setiap variabel dengan nilai korelasi antara variabel. Pengujian model kedua ini dikatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai akar AVE lebih besar dari korelasi antar variabel dalam model atau suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan loading factor kepada konstruk lain. Nilai cross loading indikator variabel). Indikator variabel mengenai Integrasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 5.

	IP	KK	PM	KB
DLH	0.57	0.227	0.299	0.241
DMKR	0.485	0.359	0.294	0.345
DPKP	0.78	0.325	0.309	0.36
DK	0.38	0.219	0.316	0.121
PUPR	0.634	0.306	0.353	0.309
KB	0.422	0.622	0.318	0.462
JL	0.351	0.738	0.374	0.559
DL	0.302	0.691	0.287	0.517
AB	0.423	0.817	0.633	0.442
SL	0.057	0.161	0.076	0.159
PS	0.287	0.587	0.197	0.465
PK	0.331	0.71	0.301	0.584
PO	0.43	0.378	0.781	0.344
OPS	0.218	0.197	0.718	0.198
SO	0.414	0.435	0.808	0.386
S	0.49	0.696	0.393	0.832
E	0.454	0.543	0.319	0.732
L	0.359	0.61	0.3	0.833

Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019

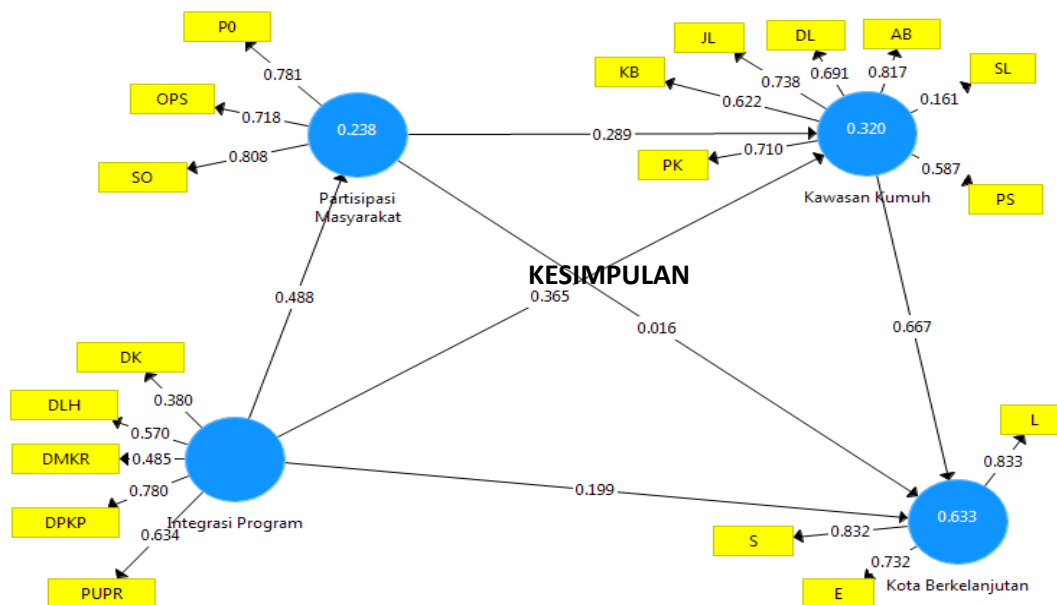
Hasil Pendugaan Konstruk Variabel-variabel dalam Diagram Jalur

Pendugaan konstruk variabel-variabel dalam diagram jalur dihasilkan dari olahan bootstrapping pada software PLS. Nilai R², berpengaruh secara signifikannya variabel moneter tersebut dapat diketahui apabila $p\text{-value} < \alpha (0,05)$. Hasil pendugaan konstruk variabel-variabel dalam diagram jalur indikator variabel mengenai Integrasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Pendugaan Konstruk Variabel-Variabel dalam Diagram Jalur Indikator Variabel Integrasi Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019

	Original Sample (O)	Standard Deviation(STDEV)	T Statistics(O/STDEV)	P -Values	Ket
KK	0.320	0.078	4.112	0.000	Signfikan
PM	0.238	0.057	4.173	0.000	Signfikan
KB	0.633	0.068	9.333	0.000	Signfikan

Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019



Analisis Jalur Hubungan Langsung antar Variabel

Pengaruh integrasi program penanganan kawasan permukiman kumuh terhadap keberlanjutan program penanganan kawasan permukiman kumuh diuji dengan pendekatan Inner Model (model structural) yang meliputi output r – square, koefisien parameter dan t – statistic. Untuk melihat korelasi tersebut diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t -statistik dan p -values. Pengujian pengaruh ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 3.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstrapping. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini adalah t -statistik $> 1,96$ dengan tingkat signifikansi p -values 0,05 (5%) dan koefisien beta (sampel original) bernilai positif.

Tabel 8. Analisis Jalur Hubungan langsung antar Variabel

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics ([O/ STDEV])	P Values
IP -> KK	0,365	0.381	0.087	4.193	0.000
IP -> KB	0,199	0.197	0.091	2.185	0.029
IP -> PM	0,488	0.506	0.058	8.442	0.000
KK -> KB	0.667	0.671	0.082	8.144	0.000
PM -> KK	0.289	0.287	0.084	3.449	0.001
PM -> KB	0.016	0.011	0.079	0.198	0.843*

Sumber : Hasil olahan aplikasi Smart PLS Versi 3.0, 2019

Data table diatas menunjukkan bahwa pengaruh langsung antar variabel bersifat moderate karena nilai original sample <0.7 dan $>0,3$. Namun pengaruh langsung variabel partisipasi masyarakat ke variabel kota keberlanjutan bersifat lemah nilainya karena $< 0,1$. Selain lemah, nilai t hitung lebih rendah dari t table dan nilai dari p-values melebihi nilai yang dipersyaratkan yaitu $0,05$. Partisipasi masyarakat tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap kota berkelanjutan karena peran serta masyarakat bila berdiri sendiri kan lemah dampaknya terhadap lingkungannya. Tingkat partisipasi masarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, usia, suku, budaya dan lainnya. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah kwasan tidak akan sama dengan kawasan lainnya.

Partisipasi masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri, karena hasilnya akan mempengaruhi skala lingkungan mereka tinggal. Selain itu, arahan kegiatan dan faktor pendaan akan menjadi faktor penghambat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Partisipsi masyarakat dalam program penanganan kawasan permukiman kumuh adalah perencanaan partisipatif sehingga pola pendekatan yang akan dilaksanakan adalah buttom up dan hasil pelaksanaan program akan lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Variabel partisipsi masyarakat melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan memerlukan intervensi terutama dari pemerintah berupa dampingan hingga masyarakat tersebut dapat berdiri sendiri dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari penurunan kualitas permukimannya. Masyarakat akan dapat menganalisa permasalahan yang timbul, melaksanakan hasil analisa dan perencanaan pemecahan masalah dan yang paling penting adalah perawatan kawasan permukimannya agar tidak timbul kekumuhan melalui keswadayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian dengan alat statistik menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanganan pemukiman kawasan kumuh berpengaruh secara signifikan dan moderate terhadap keberlanjutan program penanganan kawasan permukiman kumuh. Integrasi program penanganan kawasan kumuh akan berhasil apabila memperhatikan/melibatkan partisipasi masyarakat dan dilaksanakan pada kawasan kumuh. Modelling tersebut sesuai dengan prinsip dasar penanganan permukiman kumuh yang menyatakan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kawasan permukiman kumuh

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. (1997). Sejumlah Masalah Permukiman Perkotaan. Bandung: PT. Alumni.
- Daldjoeni. (2003), Geografis Kota dan Desa, Bandung: PT. Alumni.
- Daldjoeni. N, Drs, Suyitni. A, Drs, (1979). Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan, Bandung: PT. Alumni.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal. (2006). Panduan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kota. Dirjen Cipta Karya.
- Dokumen SPPIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (2014). Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Dokumen RP2KP Ditjen Cipta Karya. (2016). Dinas Pekerjaan Umum.
- Ervianto, Wulfram, I. (2018). Kajian tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus Kota Yogyakarta), Media Teknik Sipil, 16(1), 60-65.
- Inoguchi, Takash. dkk, (2017). Kota dan Lingkungan, Jakarta: LP3ES.
- Kustiawan, I dan A. Ramahan. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan : Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung. Journal of Regional and Rural Development Planning, 3(1), 64-68.
- Martokusumo, Widjaja. (2006). Revitalisasi dan Rancang Kota: Beberapa Catatan dan Konsep Penataan Kawasan Kota Berkelanjutan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 17(3), 31-46.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016
- Rosyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian.(2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya terhadap Komunitas Perdesaaan. Jurnal Solidarity, 05(1), 51-70.
- Setiadi, Rukuh dkk. (2008). Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang. Jurnal Riptek, 2(2), 1-8.
- Setiawan, B. (2007). Indikator Keberlanjutan Kota di Indonesia: Studi Komperasi Empat Kota di Jawa. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 14(1), 1-14.
- Slump Improvement Action Plan (SIAP) NUSP-2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Sudarmo (2015). Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance. Surakarta :Universitas Sebelas Maret.
- Tungkal Ilir dalam Angka. 2015, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2011